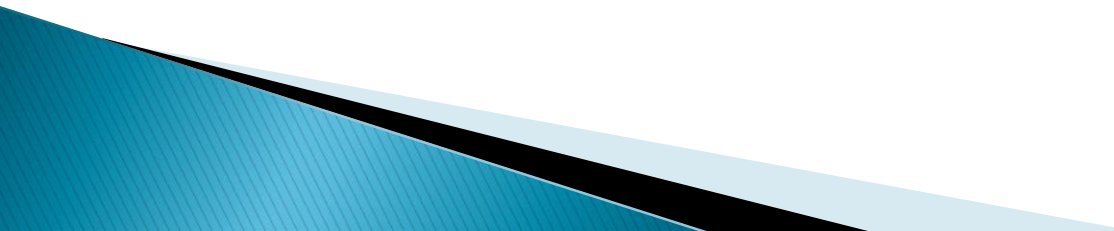


MODEL-MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN

DR. NOVITA TRESIANA
PERTEMUAN 5

CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. **Menjelaskan dan Memahami Model Top Down dalam Implementasi Kebijakan**
 2. **Menjelaskan dan Memahami Model Bottom Up dalam Implementasi Kebijakan**
- 

LIHAT TEORI DI BAWAH INI

Jones (1987) ;

- ▶ *those activities directed toward putting a program into effect* (proses mewujudkan program hingga memperlihatkan hasilnya)

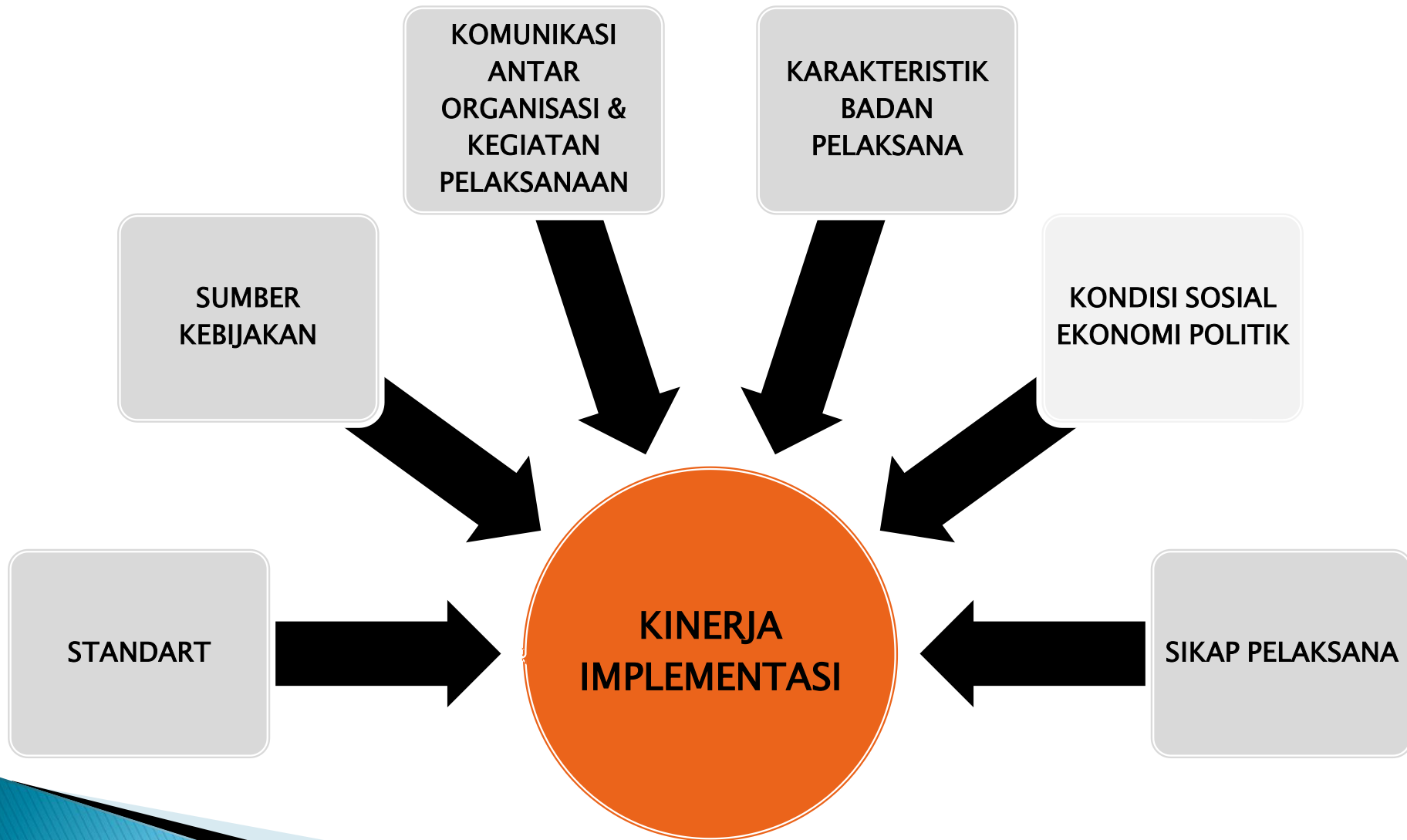
Van Horn dan Van meter (1975) :

- ▶ *those actions by public and private individual (or groups) that are the achievement or objectives set forth in prior policy* (tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah maupun swasta baik secara individu maupun kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang menjadi prioritas kebijakan)

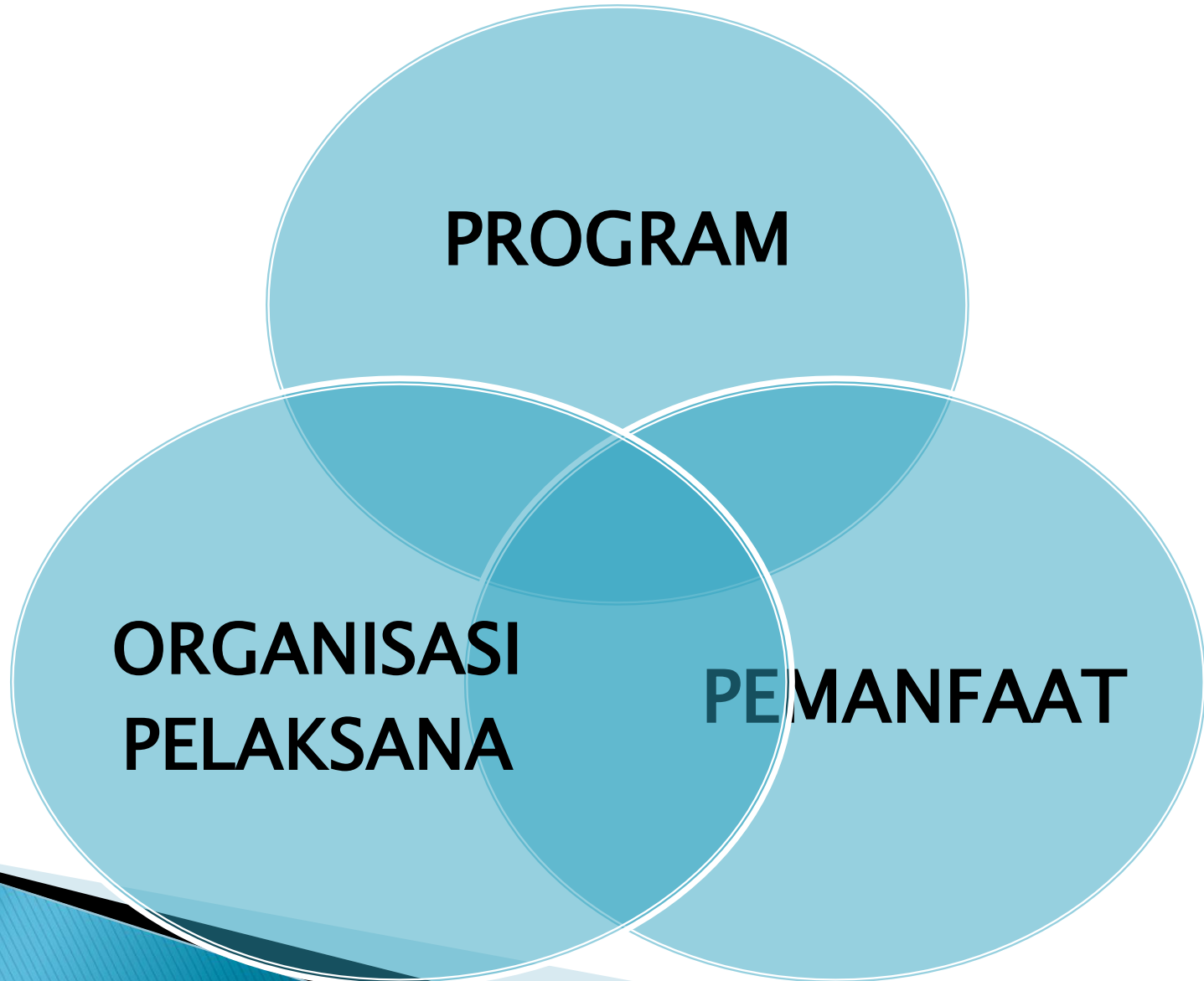
GRINDLE, 1980

- ▶ **MERUPAKAN** KEGIATAN ADMINISTRASI-POLITIK YG BUKAN SEMATA BERKAITAN DGN MEKANISME PENJABARAN KEPUTUSAN POLITIK KE DALAM PROSEDUR RUTIN LEWAT SALURAN BIROKRASI, MELAINKAN MENYANGKUT **BANYAK AKTOR PLUS KEPENTINGAN (KONFLIK), MENGAMBIL KEPUTUSAN ATAS 'SIAPA' YANG MEMPEROLEH APA DARI SUATU KEBIJAKAN**

Model Van Meter & Van Horn



MODEL KORTEN & SYAHRIR



Grindle (lanjutan)

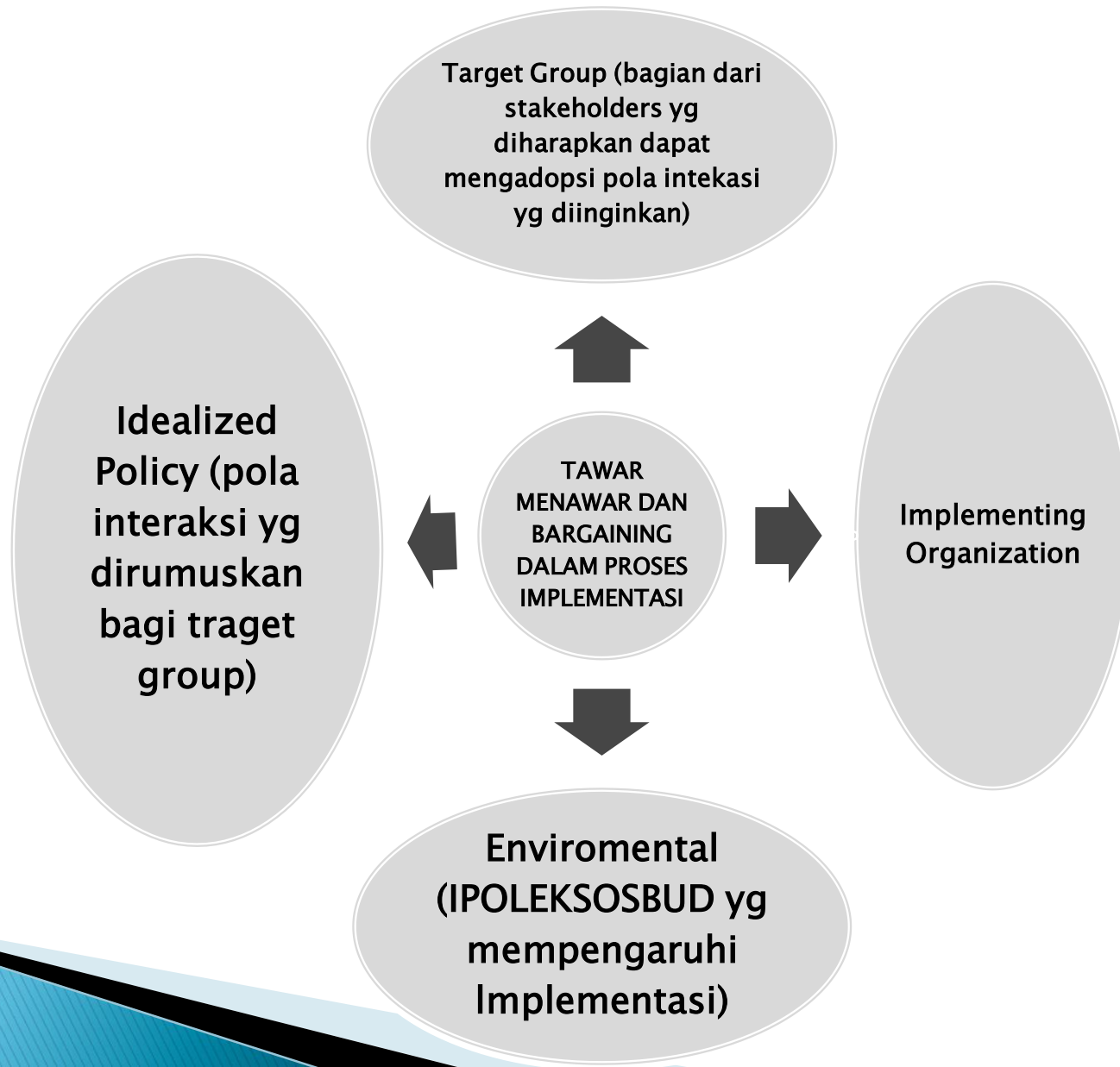
CONTENT OF POLICY :

- 1) kepentingan yg dipengaruhi: Semakin banyak semakin sulit diimplementasikan.
- 2) Jenis manfaat yg diperoleh: Kebijakan yg memberi manfaat aktual dan bukan hanya formal dan simbolis lebih mudah diimplementasikan
- 3) Derajat perubahan yg diinginkan; Perubahan sikap dan perilaku akan sulit dilakukan
- 4) Kedudukan/ posisi pembuat kebijakan.
- 5) Siapa pelaksana program
- 6) Sumber daya yg dikerahkan

Context of policy

1. kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yg terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana

Model Alur/ proses yg berorientasi pad target group (Smith)



REALITAS IMPLEMENTASI

- ▶ **MENGAPA** suatu kebijakan yang sudah dirumuskan dengan baik, dengan melalui proses deliberasi yang panjang, kemudian gagal diimplementasikan ?
- ▶ **MENGAPA** suatu kebijakan nasional yang sama diimplementasikan oleh pemerintah daerah memiliki variasi keberhasilan implementasi yang berbeda-beda?
- ▶ **MENGAPA** suatu jenis kebijakan tertentu lebih mudah/lebih berhasil diimplementasikan dibanding dengan yang lain?.

Beberapa model Implementasi (Parsons, 1997)

MODEL ANALISIS KEGAGALAN ,
(implementasi sbg proses interaksi
antara tujuan dan tindakan(Pressman &
Wildavsky, 1973), implementasi sebagai
politik adaptasi saling menguntungkan (Mc Laughin, 1975)

MODEL TOP DOWN : mengidentifikasi
faktor yang menyebabkan keberhasilan
implementasi (Van Meter van Hoirn
(1975), Grindle (1980), Sabatier &
Mazmanian (1979) dsb

MODEL IMPLEMENTASI

MODEL BOTTOM UP : mengidentifikasi
faktor lain dan interaksi organisasi
antara Pemerintah dg warga negara
(lipsky, 1971), Implementasi sebagai
proses yg disusun melalui konflik dan
bergaining (Wetherly, 1977),
Implementasi sebagai proses alur (Smith,
1973)

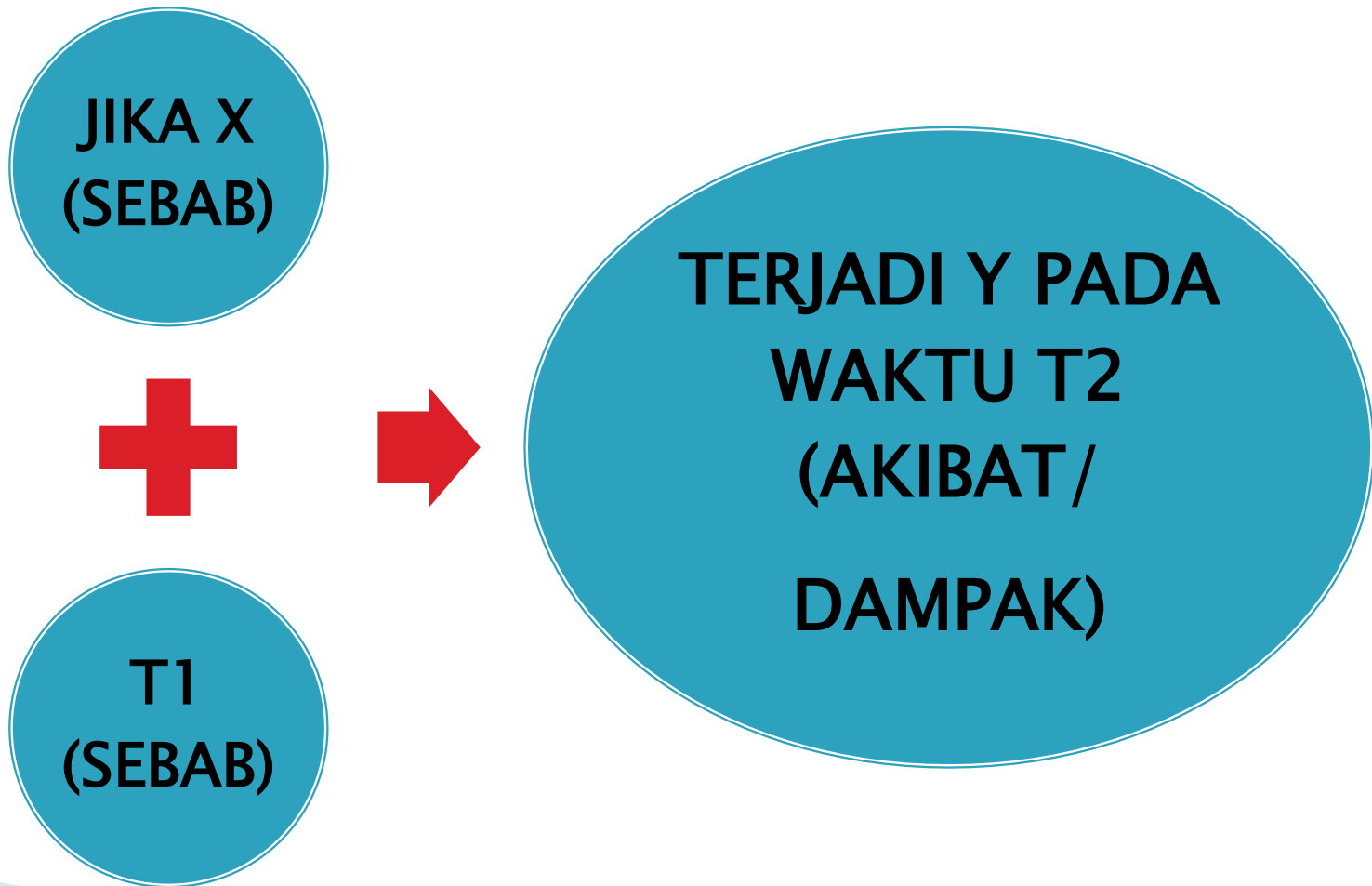
MODEL SINTESIS : Ripley & Franklin
(1985), Nakamura & Smallwood
(1986) dsb

1. MODEL TOP DOWN

GAGASAN RASIONAL TOP DOWN

- ▶ TOKOH-TOKOH : Van Meter dan Van Horn (1975), Hood (1976), Gunn (1975), Sabatier dan Mazmanian (1979), Grindle, **LIPSKY, ANDREW DU**
- ▶ GAGASAN MEMANDANG **KEPUTUSAN DAN KEKUASAAN SERTA PENGAMBIL KEPUTUSAN** SEBAGAI POTENSI YG BISA MENIMBULKAN PERUBAHAN, DGN PREFERESINYA PADA TINGKATAN, HIRARKI, KONTROL DAN PEMABATASAN (ATURAN DAN KONFLIK)
- ▶ MERUPAKAN SOAL PENGEMBANGAN SEBUAH **PROGRAM KONTROL YG MEMINIMALKAN KONFLIK DAN DEVIASI DARITUJUAN** YG TELAH DITETAPKAN OLEH HIPOTESIS

PENDEKATAN SISTEM RASIONAL TOP-DOWN



PRASYARAT/HIPOTESISI KEBERHASILAN IMPLEMENTASI TOP DOWN

**KEBIJAKAN (UU/PROGRAM)
DAN TUJUAN TELAH
DIDIFINISIKAN DGN BAIK**

**IMPLEMENTASI IDEAL ADL
PRODUK ORGANISASI YG PADU
SPT MILITER, DGN GARIS
OTORITAS YG TEGAS (UTK
KONTROL YG BAIK)**

**NORMA–NORMA AKAN DITEGAKKAN
BAHWA ORG AKAN MELAKSANAKAN
APA YG DIMINTA DAN
DIPERINTAHKAN (PEMAHAN AKAN
TUJUAN DAN KEPATUHAN PADA
ATURAN))**

**ADA BANYAK DUKUNGAN DAN
BANYAK SUMBER 9DUKUNGAN
BERBAGAI SUMBERDAYA**

**HARUS ADA KOMUNIKASI YG SEMPURNA DIDLM
DAN DIANTARA ORGANISASI (KOMUNIKASI DAN
MONITORING UTK KONTROL
INDIVIDU&ORGANISASI YG TERLIBAT)**

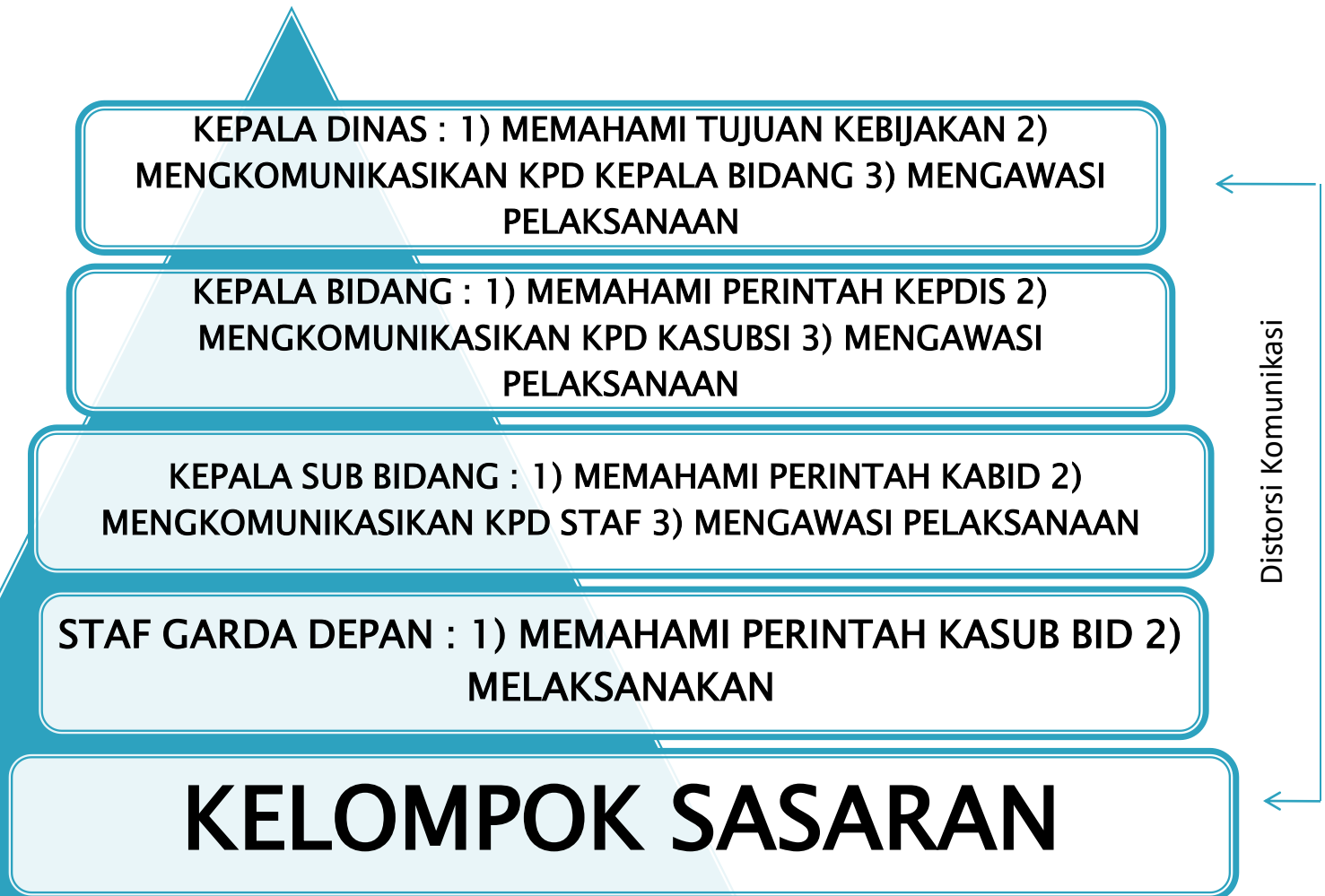
MODEL IMPLEMENTASI TOP-DOWN

**LOGIKA BERFIKIR DARI ATAS (PIMPINAN-
BAWAHAN/KEBIJAKAN-PELAKSANAAN LAPANG)**

**COMMAND AND CONTROL : PIMPINAN
MENERJEMAHKAN&MENGAWASI**

**EFEKTIVITAS PELAKSANAAN DI LAPANGAN :
SESUAI DENGAN COMMAND (PERINTAH)**

Hirarki Implementasi (Dinas pemma)



DIMENSI PENYEBAB KEGAGALAN IMPLEMENTASI RASIONAL TOP DOWN :

DIMENSI-DIMENSI KEGAGALAN

**FAKTOR PEMILIHAN STRATEGI YG
KELIRU/MESIN INSTRUMEN YG KELIRU**

**PEMROGRAMAN BIROKRASINYA YG
SALAH**

OPERASIONALISASINYA YG BURUK

**ADA YG SALAH PADA TINGKAT
PELAKSANA/RESPON BURUK THD PROBLEMA**

KEGIATAN PENELITIAN IMPLEMENTASI TOP-DOWN

- ❑ Memilih kebijakan yang akan di kaji
 - ❑ Mempelajari dokumen kebijakan yang ada untuk dapat mengidentifikasi tujuan dan sasaran yang secara formal tercantum dalam dokumen kebijakan
 - ❑ Mengidentiifikasikan bentuk-bentuk keluaran kebijakan yang digunakan sebagai instrument untuk capai tujuan dan sasaran kebijakan
- 

LANJUTAN

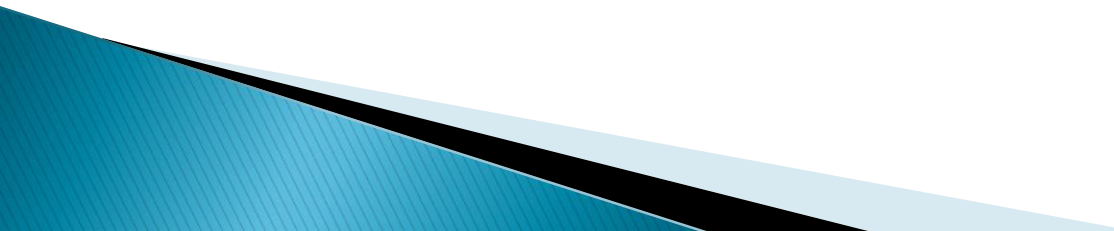
- ❑ Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan telah diterima oleh kelompok sasaran dengan baik (sesuai SOP yang ada)
- ❑ Mengidentifikasi apakah keluaran kebijakan memiliki manfaat bagi kelompok sasaran.

LANJUTAN

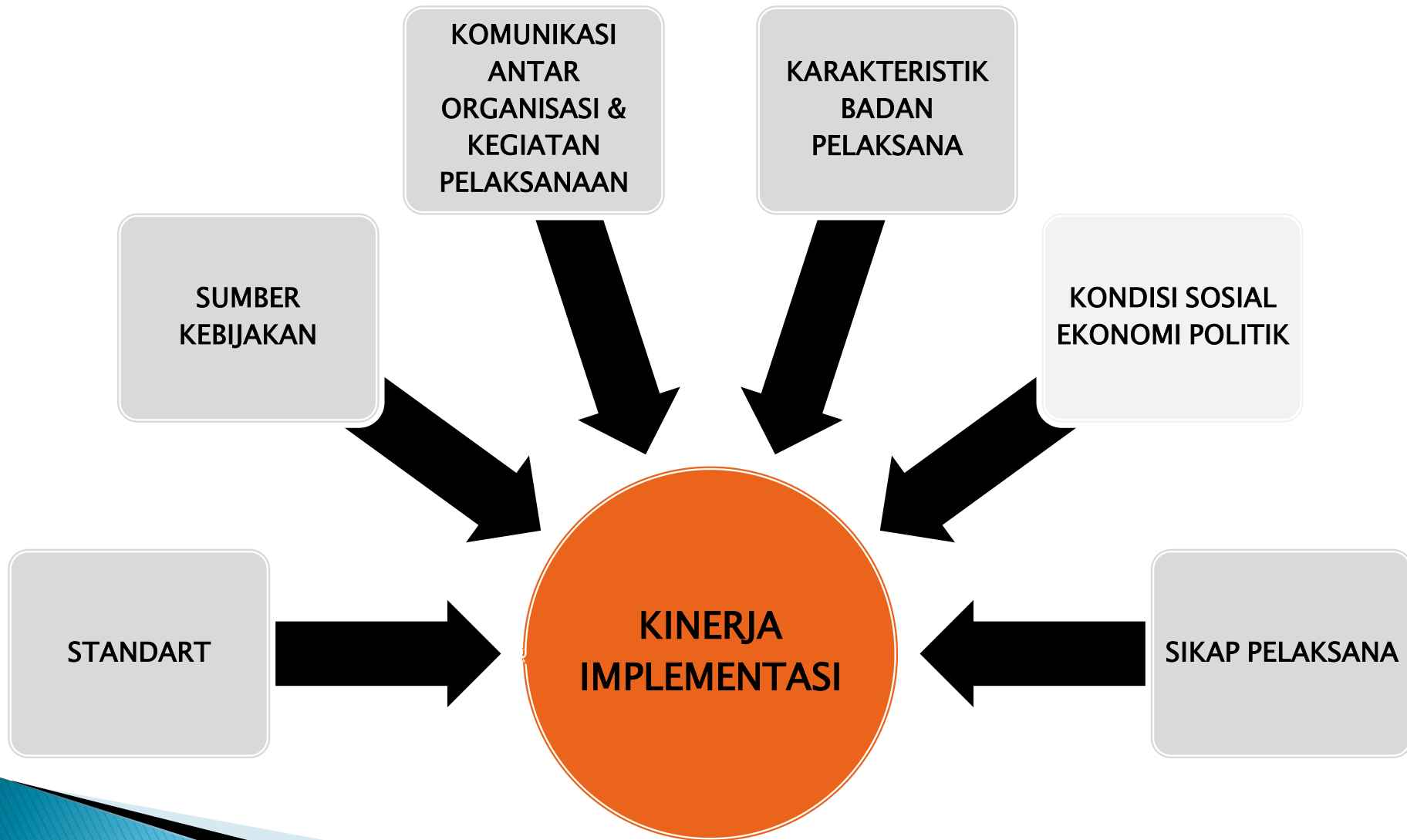
- ❑ Mengidentifikasi apakah muncul dampak setelah kelompok sasaran memanfaatkan keluaran kebijakan yang mereka terima.
- ❑ Analisis kemudian diarahkan untuk mengetahui apakah dampak tersebut berimplikasi terhadap terwujudnya tujuan kebijakan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen kebijakan.

MODEL IMPLEMENTASI TOP-DOWN

MODEL-MODEL IMPLEMENTASI TOP-DOWN

- ❑ Donalds Van meter & Carl E. Van Horn
 - ❑ George C Edwards III
 - ❑ Merilee Grindle
 - ❑ Daniel H Mazmanian & Paul Sabatier
- 

Model Van Meter & Van Horn



Model Van Meter & Van Horn

- ▶ Studi Implementasi hakikatnya mrpk penilaian atas kinerja kebijakan
- ▶ Kinerja kebijakan dipengaruhi oleh :
 - ▶ 1. **Standard** (ukuran dasar) dan tujuan kebijakan. Ini berkaitan dg sejauhmana standard direalisasikan, sebab : sering telalu luas dan kabur, shg susah diukur
 - ▶ 2. **Sumber– sumber Kebijakan** : Dana SDM, Fasilitas
 - ▶ 3. **Komunikasi antar organisasi & keg pelaksanaan**, khususnya mengkomunikasikan standard aturan, shg diperoleh ketepatan dan konistensi sekaligus ebagai alat ukur dalam pengawasan
 - ▶ 4. **Karakteristik badan pelaksana** : menyangkut karakteristik, norma dan pola hub yang ada.

Dalam hal ini yg harus dicermati adalah :

- a. kompetensi dan jumlah staff
- b. Rentang kendali (hierarki)
- c. Dukungan politik yg dimiliki
- d. Kekuatan organisasi
- e. Derajat keterbukaan dan kebebasan komunikasi
- f. Keterkaitan dg pembuat kebijakan

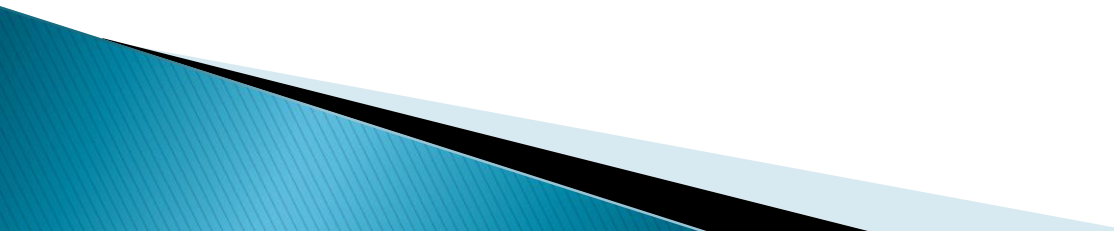
5. **Kondisi sosial ekonomi dan politik**

6. **Sikap pelaksana**, meliputi persepsi pelaksana atas masalah, tandard dan tujuan serta sejauhmana bertentangan dg kepentingan pelaksana

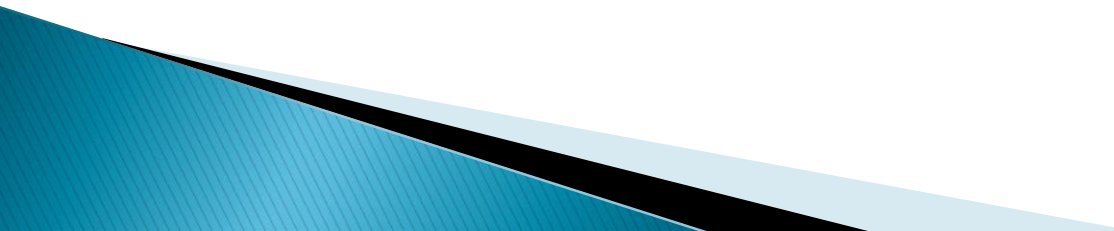
Model G. Edwards III

- ▶ Didasari pertanyaan :
 1. Prakondisi apa yg diperlukan agar implementasi berhasil
 2. Hambatan utama yg menyebabkan implementasi gagal

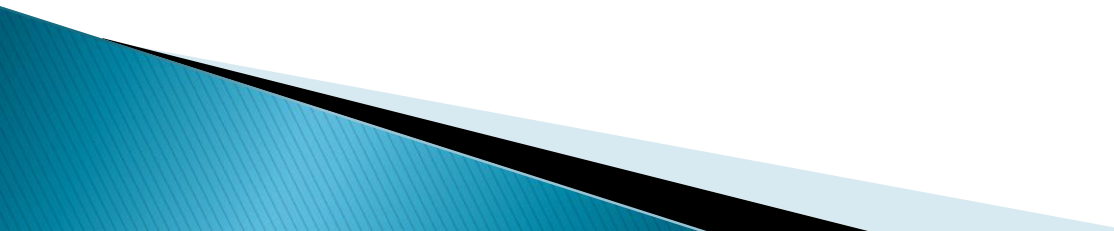
Ada 4 variabel penting dalam implementasi :

1. Komunikasi
 2. Sumber-sumber
 3. Sikap pelaksana
 4. Struktur Birokrasi
- 

► **Komunikasi, penting sebab :**

1. Setiap pelaksana harus memahami apa yg dilakukan
 2. pelaksana harus memahami juklak
 3. Pelaksana hrs konsisten pada juklak
 4. Sering ditemukan hambatan dalam penyampaian inf pd hierarkhi orgs yg berlapis-lapis
 5. Semakin baik komunikasi akan semakin baik implementasi
 6. Mengurangi distori informasi
 7. transparansi
- 

- ▶ **Sumber– sumber ini menyangkut :**
 1. Staff yg memadai dan berkeahlian sesuai kebutuhan
 2. Informasi tentang kebijakan
 3. Wewenang yg dimiliki pelaksana
 4. Fasilitas yg ada

 - ▶ **Sikap pelaksana meliputi :**
 1. Sikap dan dukungan aparat pelaksana
 2. Perilaku birokrasi
- 

- ▶ Struktur birokrasi, meliputi :
 1. Prosedur kerja dan ukuran dasarnya
 2. Hierarkhis struktur organisasi
 3. koordinasi, desentralisasi, kewenangan dsb

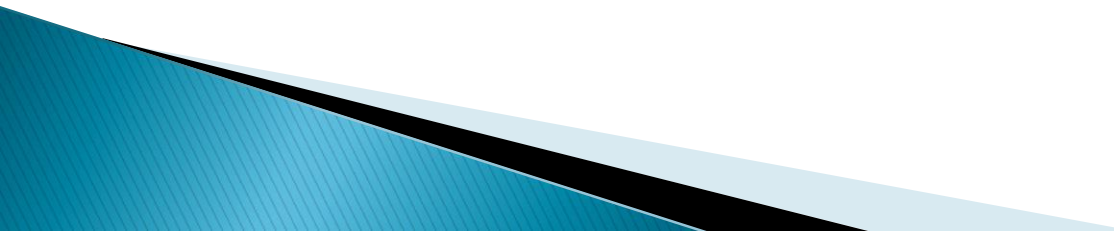
Karakteristik umum Birokrasi (Ripley & Franklin, 1985)

- ▶ **1. Pervasiveness** : birokrasi ada dimana mana dan mrpk instrumen sosial yg dipilih untuk mengatasi persoalan publik
- ▶ **2. Selective importance**; Birokrasi dominan dalam implementasi dan mempunyai kepentingan yg berbeda dalam tiap tahap.
- ▶ **3. Birokrasi banyak memp tujuan sosial yg berbeda** :
 - Birokrasi dicipt untuk memberikan pelayanan yg sebenarnya menjadi tg jwb pemerintah
 - Birokrasi diciptakan untuk mempromosikan kept sektor ekonomi ttt (petani, buruh, pengusaha dsb)
 - Birokrasi diciptakan untuk mendistribusikan keuntungan, hak dan pelayanan di berbagai bidang (pendidikan, kesehatan dsb) shg masy bisa memanfaatkannya

Karakteristik birokrasi (lanjutan)

- ▶ **4. Size and Complexity:** Birokrasi disusun untuk konteks urusan publik yang luas dan kompleks, sehingga banyak yang diserahkan ke swasta
- ▶ **5. Survival;** Birokrasi jarang mati, mempunyai naluri tetap hidup (jml peg tambah, urusan menjadi lebih besar dsb)
- ▶ **6. Tidak netral** (krs sering harus menunggu atau memahami apa yg menjadi kehendak otoritas di atasnya) tetapi juga tidak sepenuhnya dikendalikan oleh kekuatan luar. Sikap birokrast thd tujuan kebijakan mrpk faktor penting dalam implementasi

Model Grindle

- ▶ Ide dasar : Setelah kebijakan ditransformasikan dalam program aksi, maka tindakan implementasi itu belum tentu lancar, akan tetapi tergantung pada implementability dari program tersebut.
 - ▶ OKI ia membagi faktor yg mempengaruhi implementasi menjadi dua yaitu Content of policy dan Context of policy
- 

Grindle (lanjutan)

- ▶ **Content of Policy**, meliputi :

1. kepentingan yg dipengaruhi: Semakin banyak semakin sulit diimplementasikan.
2. Jenis manfaat yg diperoleh: Kebijakan yg memberi manfaat aktual dan bukan hanya formal dan simbolis lebih mudah diimplementasikan
3. Derajat perubahan yg diinginkan; Perubahan sikap dan perilaku akan sulit dilakukan
4. Kedudukan/ posisi pembuat kebijakan.
5. Siapa pelaksana program
6. Sumber daya yg dikerahkan

- ▶ **Context of policy**, meliputi :

1. kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yg terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana

Model Sabatier & Mazmanian

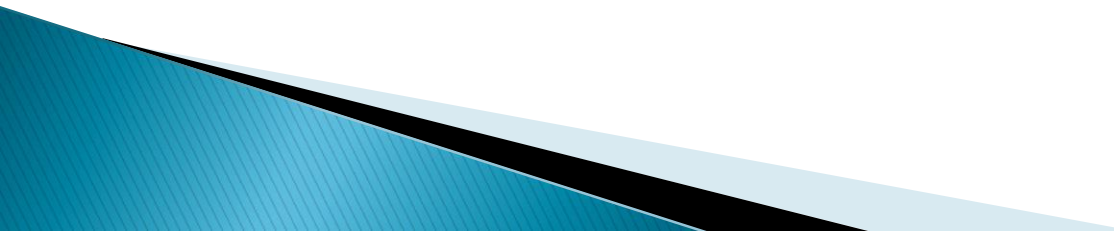
Implementasi mrpk fungsi 3 variabel :

- ▶ **1. Karakteristik Masalah**, yg meliputi :
 - ▶ – Ketersediaan teknologi & teori teknis
 - ▶ – keragaman perilaku sasaran
 - ▶ – Sifat Populasi
 - ▶ – Derajat perubahan perilaku ygdiharap

Sabatier & Mazmanian(lanjutan)

- ▶ **2. Struktur manajemen program** (aturan yang mengoperasionalkan kebijakan), meliputi:
 - Kejelasan dan konsistensi tujuan
 - Teori kausal yg memadai
 - Sumber dana yg mencukupi
 - Integrasi organisasi pelaksana
 - Diskresi Pelaksana
 - Rekrutmen pejabat pelaksana
 - Akses formal pelaksana ke organisasi lain

3. Faktor diluar Peraturan, meliputi :

- ▶ – Kondisi sosial, ekonomi dan teknologi
 - ▶ – Perhatian pers thd masalah kebijakan
 - ▶ – Dukungan publik
 - ▶ – Sikap dan sumber daya kel. Sasaran
 - ▶ – Dukungan kewenangan
 - ▶ – komitmen dan kemampuan pej pelaks
- 

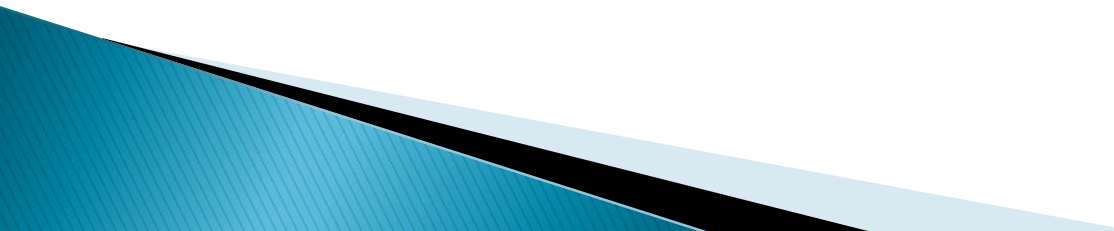
- ▶ Menurut model top down, jika semua variabel dapat bekerja dg baik maka proses implementasi berjalan seperti yg diharapkan.
- ▶ Variabel tsb dapat bersumber dari :
 - program itu sendiri
 - pelaksana
 - sasaran kebijakan
 - lingkungan kebijakan

Model G. Edwards III

MENJELASKAN :

1. **Prakondisi apa yg diperlukan agar implementasi berhasil**
2. **Hambatan utama yg menyebabkan implementasi gagal**

ADA 4 VARIABEL DLM IMPLEMENTASI:

1. **Komunikasi**
 2. **Sumber-sumber**
 3. **Sikap pelaksana**
 4. **Struktur Birokrasi**
- 

Model G. Edwards III

KOMUNIKASI

- Setiap pelaksana harus memahami apa yg dilakukan
- pelaksana harus memahami juklak
- Pelaksana hrs konsisten pada juklak
- Sering ditemukan hambatan dalam penyampaian inf pd hierarkhi orgs yg berlapis–lapis
- Semakin baik komunikasi akan semakin baik implementasi
- Mengurangi distori informasi
- transparansi

Model G. Edwards III

SUMBER- SUMBER

- Staff yg memadai dan berkeahlian sesuai kebutuhan
- Informasi tentang kebijakan
- Wewenang yg dimiliki pelaksana
- Fasilitas yg ada

Model G. Edwards III

**SIKAP
PELAKSANA**

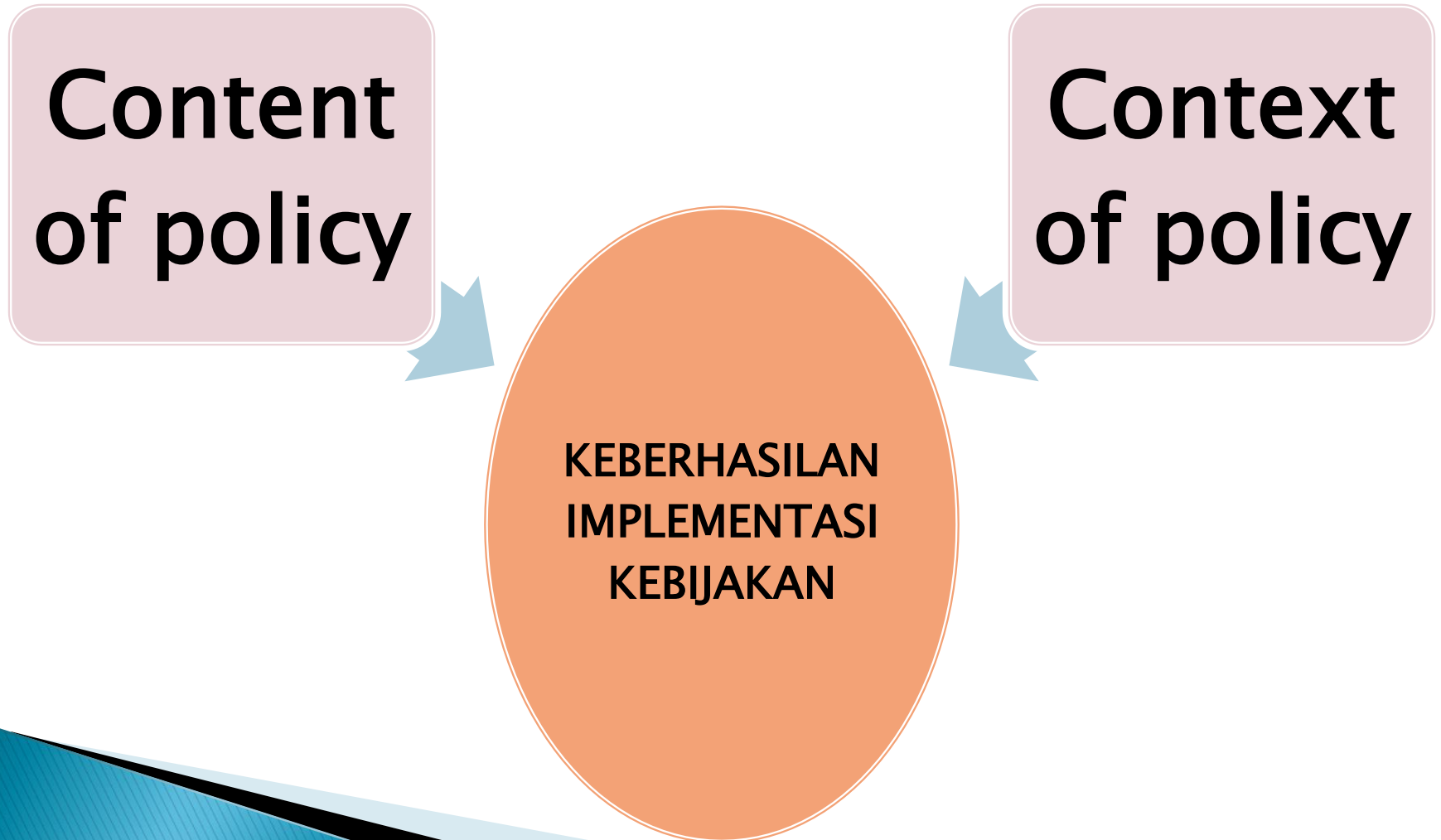
- **SIKAP DAN
DUKUNGAN APARAT
PELAKSANA**
- **PRILAKU BIROKRASI**

Model G. Edwards III

STRUKTUR BIROKRASI

- **PROSEDUR
KERJA&UKURAN
DASARNYA**
- **Hierarkhis struktur
organisasi**
- **Koordinasi,
desentralisasi,
kewenangan**

Model Grindle



Grindle (lanjutan)

CONTENT OF POLICY :

- 1) kepentingan yg dipengaruhi: Semakin banyak semakin sulit diimplementasikan.
- 2) Jenis manfaat yg diperoleh: Kebijakan yg memberi manfaat aktual dan bukan hanya formal dan simbolis lebih mudah diimplementasikan
- 3) Derajat perubahan yg diinginkan; Perubahan sikap dan perilaku akan sulit dilakukan
- 4) Kedudukan/ posisi pembuat kebijakan.
- 5) Siapa pelaksana program
- 6) Sumber daya yg dikerahkan

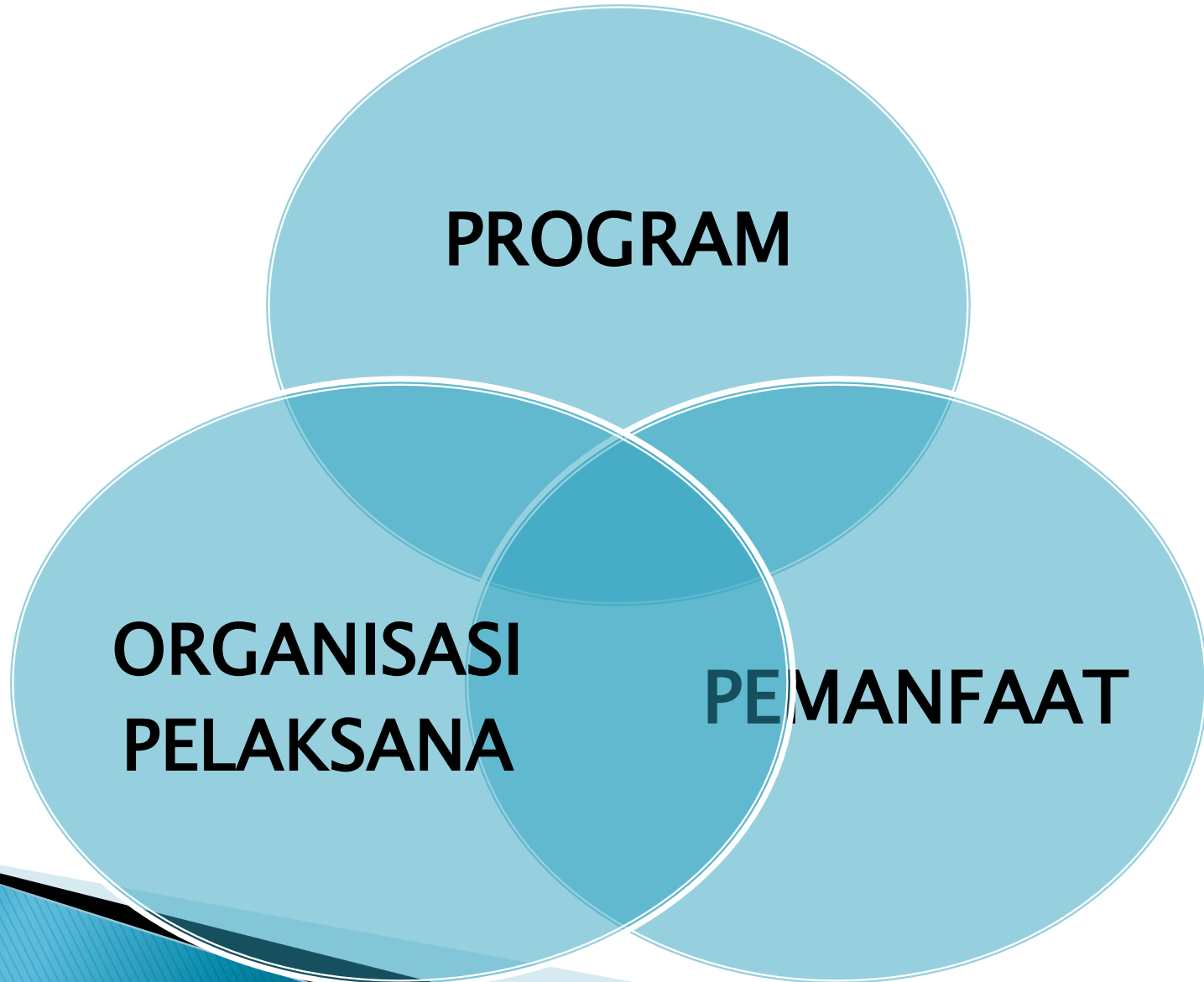
Context of policy

1. kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yg terlibat
2. Karakteristik lembaga dan penguasa
3. Kepatuhan serta daya tanggap pelaksana

MODEL Ripley dan Franklin



MODEL KORTEN & SYAHRIR



Model Sabatier & Mazmanian



A. mudah/tidaknya masalah dikendalikan:

- Kesukaran-kesukaran teknis & keragaman perilaku kelompok sasaran
- Persentase kelompok sasaran dibandingkan jumlah penduduk
- Ruang lingkup perubahan perilaku yang diinginkan

B. Kemampuan Kebijakan untuk Menstrukturkan Proses Implementasi :

- Kejelasan & konsistensi tujuan
- Digunakannya teori kausal yang memadai
- Ketepatan alokasi sumber dana
- Keterpaduan hirarki dalam dan diantara lembaga pelaksana
- Aturan keputusan dari badan pelaksana
- Rekrutmen pejabat pelaksana
- Akses formal pihak luar

C. Variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi:

- Kondisi sosio-ekonomi & teknologi
- Dukungan publik
- Sikap & sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok
- Dukungan dari pejabat atasan
- Komitmen & kemampuan kepemimpinan pejabat-pejabat pelaksana

D. Tahap-tahap dalam Proses Implementasi (Variabel Tergantung):

Output kebijakan
badan pelaksana -->

Kesediaan kelompok
sasaran mematuhi
output kebijakan-->

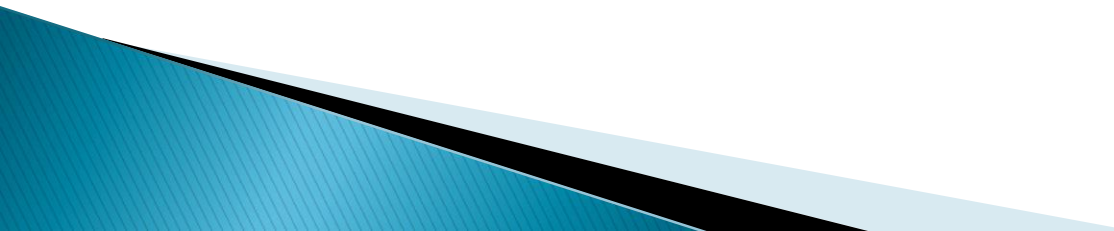
Dampak nyata output
kebijakan ----->

Dampak output
kebijakan sebagai
dipersepsi----->

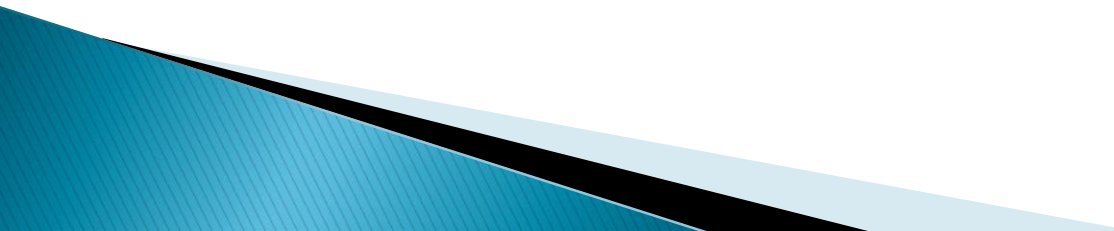
Perbaikan mendasar
dalam undang-undang

Model Sabatier & Mazmanian

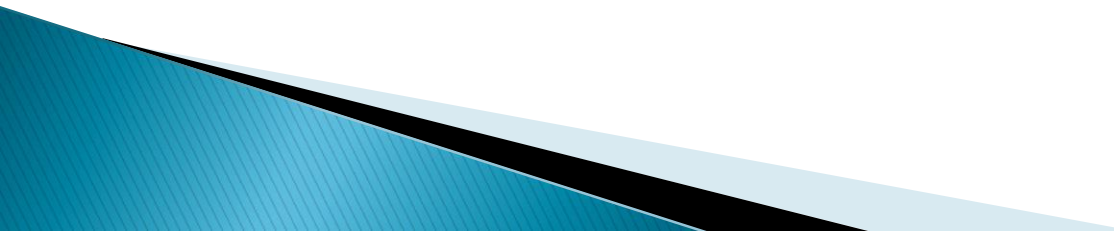
Implementasi mrpk fungsi 3 variabel :

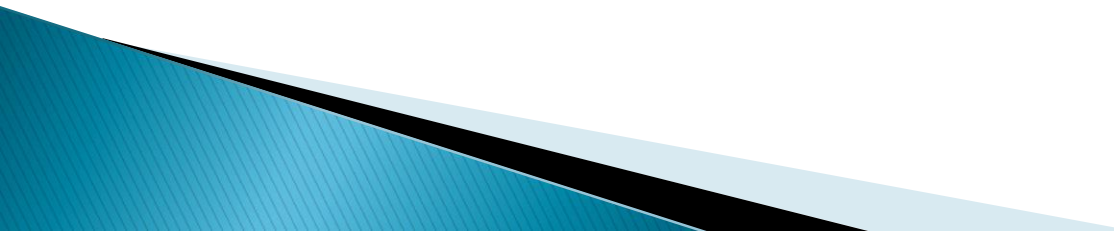
- ▶ **1. Karakteristik Masalah**, yg meliputi :
 - ▶ – Ketersediaan teknologi & teori teknis
 - ▶ – keragaman perilaku sasaran
 - ▶ – Sifat Populasi
 - ▶ – Derajat perubahan perilaku ygdiharap
- 

Sabatier & Mazmanian(lanjutan)

- ▶ **2. Struktur manajemen program** (aturan yang mengoperasionalkan kebijakan), meliputi:
 - Kejelasan dan konsistensi tujuan
 - Teori kausal yg memadai
 - Sumber dana yg mencukupi
 - Integrasi organisasi pelaksana
 - Diskresi Pelaksana
 - Rekrutmen pejabat pelaksana
 - Akses formal pelaksana ke organisasi lain
- 

3. Faktor diluar Peraturan, meliputi :

- ▶ – Kondisi sosial, ekonomi dan teknologi
 - ▶ – Perhatian pers thd masalah kebijakan
 - ▶ – Dukungan publik
 - ▶ – Sikap dan sumber daya kel. Sasaran
 - ▶ – Dukungan kewenangan
 - ▶ – komitmen dan kemampuan pej pelaks
- 

- ▶ Menurut model top down, jika semua variabel dapat bekerja dg baik maka proses implementasi berjalan seperti yg diharapkan.
 - ▶ Variabel tsb dapat bersumber dari :
 - program itu sendiri
 - pelaksana
 - sasaran kebijakan
 - lingkungan kebijakan
- 

KRITIK-KRITIK PENDEKATAN TOP-DOWN



PEMBUAT KEBIJAKAN



PELAKSANA KEBIJAKAN



**PELAKSANA KEBIJAKAN
GARDA DEPAN**



**KELOMPOK SASARAN/PENERIMA
PERUBAHAN/TARGET KEPUTUSAN**

KRITIK-KRITIK

- 1) Menganggap bahwa aktor utama yang paling berpengaruh dalam implementasi adalah policy maker, sehingga mereka lupa bawa keberhasilan dan kegagalan implementasi dapat dipengaruhi oleh aktor-aktor lain, yaitu birokrat garda depan, kelompok sasaran, sector swasta dan lain-lain
 - 2) Pendekatan top down melupakan kenyataan bahwa birokrat garda depan dan kelompok sasaran cenderung untuk menyelewengkan arah kebijakan bagi kepentingan masing-masing.
- 

KRITIK THD RATIONAL TOP DOWN



PRILAKU BIROKRATIS DI LAPANGAN

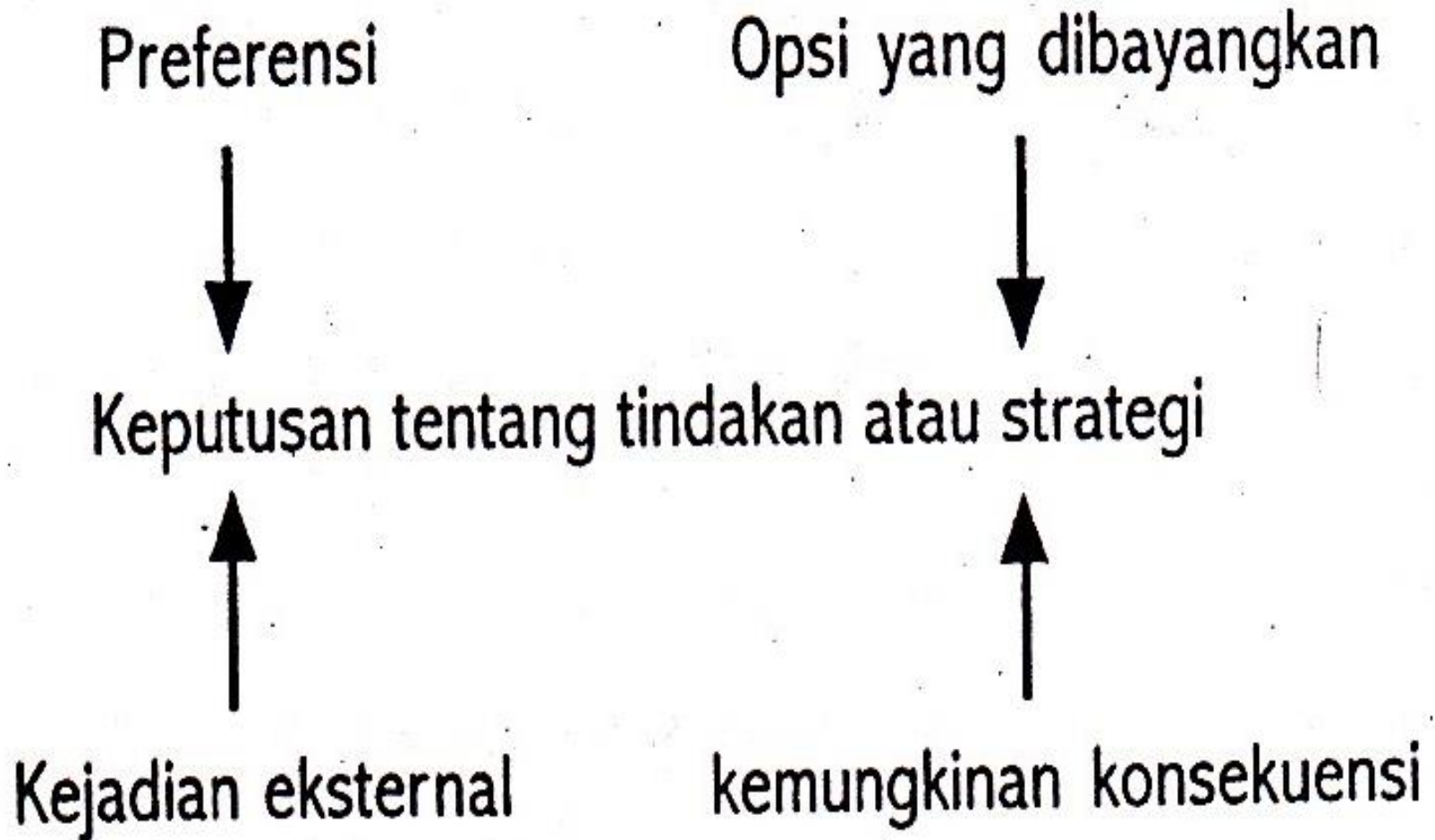
- ❑ KESUKSESAN IMPLEMENTASI TIDAK LAGI DIDASARI OLEH PEMENUHAN SEBUAH HIPOTENSIS, NAMUN MELALUI PEMETAAN MUNDUR (BACKWARD MAPPING), YAKNI BERDASARKAN TERM MANUSIA/PRILAKU
- ❑ IMPLEMENTASI YG EFEKTIF ADL SEBUAH KONDISI YG DIBANGUN DARI PENGETAHUAN&PENGALAMAN DR ORG-ORG YG ADA DI GARIS DEPAN PEMBERI PELAYANAN

IMPLEMENTASI SBG PERMAINAN POLITIK

- ❑ PERSOALAN POLITIK TDK BERHENTI DI PERUMUSAN, NAMUN BERLANJUT DI IMPLEMENTASI
- ❑ IMPLEMENTASI DI KONSTRUKSI SBG PROSES KONFLIK DAN PEREBUTAN KEKUASAAN YG ADA DISEKITAR ORGANISASI MENYEBABKAN KEBIJAKAN DIIMPLEMENTASIKAN SECARA BERBEDA-BEDA



IMPLEMENTASI DLM PERSPEKTIF KONFLIK (KAUFMAN, 1992)



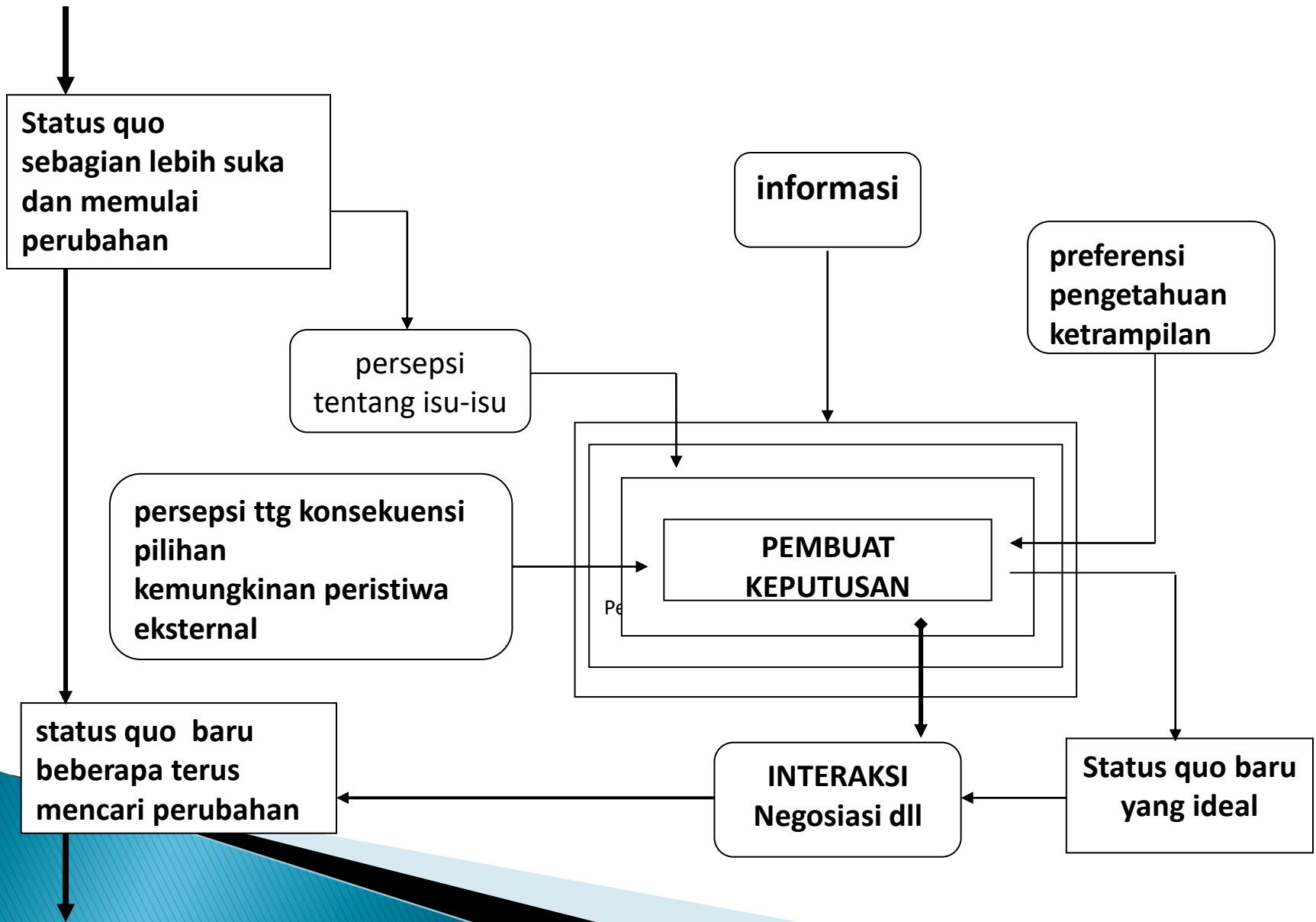
Kelompok
individual

Organisasi

Lingkungan politik

Lingkungan kepentingan

Lingkungan kejadian



2. MODEL BOTTOM UP



Model Alur/ proses (Smith)– Bottom Up model

- ▶ Model ini melihat proses implementasi kebijakan publik dari perspektif perubahan sosial politik.
- ▶ Biasanya dilakukan terhadap kebijakan pemerintah yg bertujuan untuk mengadakan perubahan atau perbaikan pada kelompok sasaran (berdimensi target group)
- ▶ Ada 4 variabel dalam proses implementasi
 1. **Idealized Policy**, yaitu pola interaksi yg diidealkan oleh perumus dg tujuan mendorong target group untuk melaks kebij
 2. **Target Group**, yaitu bagian dari stakeholders yg diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi yg diinginkan
 3. **Implementing Organization**, yaitu pelaksana yg bertanggung jawab dalam pelaksanaan.
 4. **Environmental factors**, yaitu unsur lingk (politik sosbud dsb) yg dapat mempengaruhi implementasi

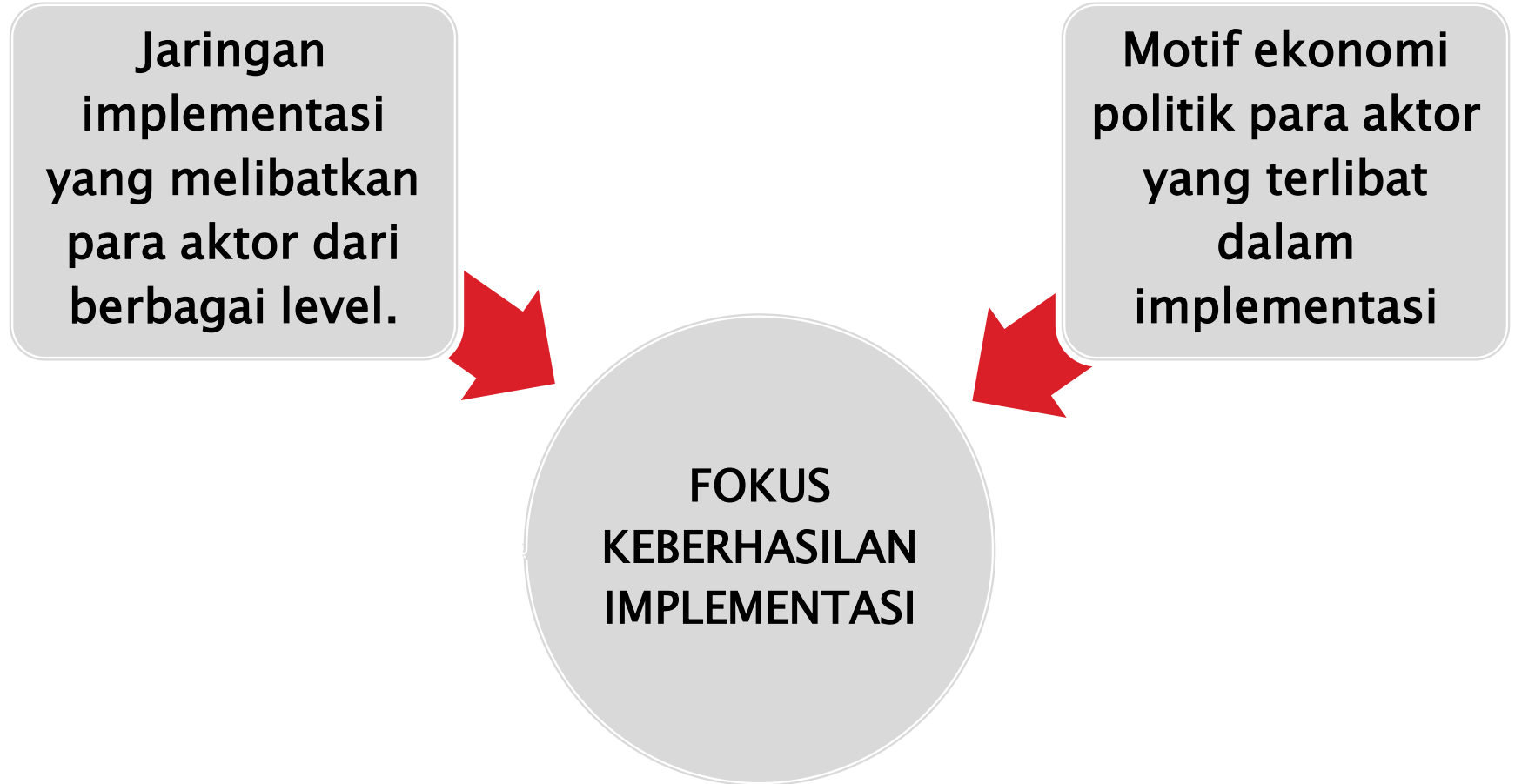
MODEL IMPLEMENTASI BOTTOM UP

- ❑ MODEL YG MEMANDANG PROSES SEBAGAI SEBUAH **NEGOISASI DAN PEMBENTUKAN KONSEKUENSI** YG MELIBATKAN 2 KONTEKS LINGKUNGAN, YAKNI **KEAHLIAN MANAJEMEN DAN KULTUR ORGANISASI**
- ❑ MEMANDANG IMPLEMENTASI SEBAGI PROSES PEMBERDAYAAN THD PIHAK-PIHAK YG MENJADI TARGET KEPUTUSAN, DGN PREFERENSI MEMILIH RUANG, JARINGAN DAN PASAR

LANJUTAN

- ❑ IMPLEMENTASI DILAPANGAN, MEMBERI KELELUASAAN DALAM PENERAPAN KEBIJAKAN SHG PELAKSANA LAPANG DAPAT **MEMILIH ATURAN/STANDAR** YG MEREKA GUNAKAN UNTUK MENERAPKAN KEBIJAKAN
- ❑ ADANAYA **KONFLIK DAN PEREBUTAN KEKUASAAN DIDALAM DAN DISEKITAR ORGANISASI** MENYEBABKAN KEBIJAKAN DIIMPLEMENTASIKAN DGN CARA YG BERBEDA-BEDA

FOKUS PENDEKATAN BOTTOM



2 ASPEK PENTING DLM IMPLEMENTASI BOTTOM UP

**Birokrat pada
level bawah
(street level
bureaucrat)**

- POSISI KUNCI DLM IMPLEMENTASI
- MEREALISASIKAN POLICY OUTPUT PADA KELOMPOK SASARAN

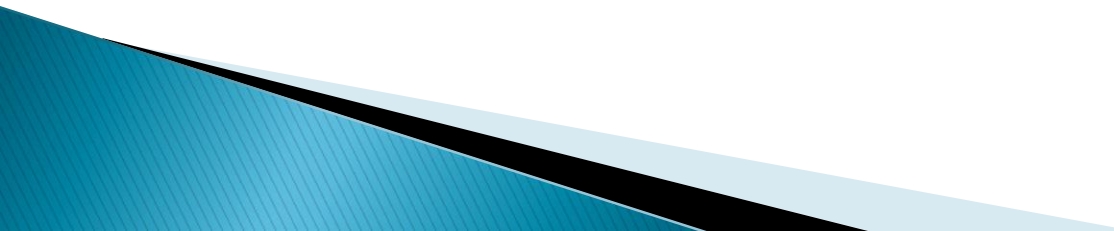
**Kelompok
sasaran
(target group).**

- KETERLIBATAN DLM PERUMUSAN
- KETERLIBATAN DLM PELAKSANAAN

PENELITIAN IMPLEMENTASI BOTTOM UP

- ▶ Memetakan stakeholder (aktor dan organisasi) yang terlibat dalam implementasi kebijakan pada level terbawah.
 - ▶ Mencari informasi dari para aktor tersebut tentang pemahaman mereka terhadap kebijakan yang mereka implementasikan dan apa kepentingan mereka terlibat dalam implementasi
- 

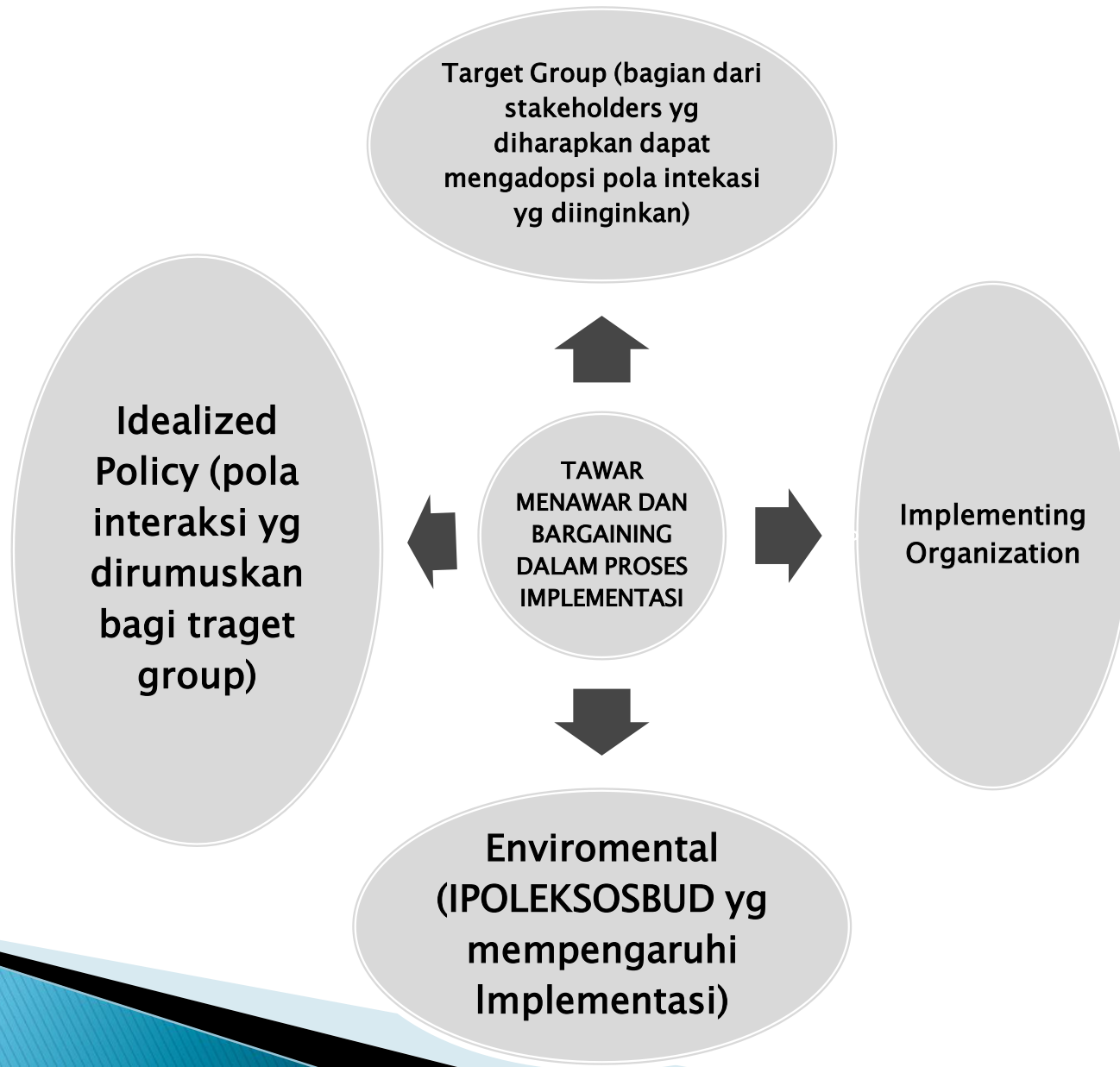
LANJUTAN

- ▶ Memetakan keterkaitan (jaringan) para aktor pada level terbawah tersebut dengan aktor-aktor di level atasnya.
 - ▶ Peneliti bergerak ke atas dengan memetakan aktor pada level yang lebih tinggi dengan mencari informasi yang sama
 - ▶ Pemetaan dilakukan terus sampai pada level tertinggi (policy maker).
- 

Model Alur/ proses (Smith)– Bottom Up model

- ▶ Model ini melihat proses implementasi kebijakan publik dari perspektif perubahan sosial politik.
- ▶ Biasanya dilakukan terhadap kebijakan pemerintah yg bertujuan untuk mengadakan perubahan atau perbaikan pada kelompok sasaran (berdimensi target group)

Model Alur/ proses yg berorientasi pad target group (Smith)



Kapan digunakan model top down & bottom up ?

- ▶ Model top down akan menguntungkan pada sebuah situasi dimana para pembuat kebijakan mampu mengatur dan mengontrol situasi, dan dana yg terbatas
 - ▶ Model Bottom up, menguntungkan pada situasi dimana implementator mempunyai kebebasan untuk melakukan inovasi tanpa ada dependensi kekuasaan dengan melihat dinamika daerah atau lingkungan kebijakan yg berbeda
 - ▶ Menurut Eric Lane (1995) model topdown menekankan tanggung jawab, sementara bottom up menekankan pada kepercayaan
- 